

**Pengaruh Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah,
Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, dan
Penerapan Sistem Pengendalian Internal terhadap Kualitas
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan Kompetensi
Sumber Daya Manusia sebagai Variabel Moderasi**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana



OLIVIA ADINDA PUTRI

NIM. B1031191044

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
PONTIANAK**

2023

PERNYATAAN BEBAS DARI PLAGIAT

Yang bertanda tangan di bawah ini;

Nama	: Olivia Adinda Putri
NIM	: B1031191044
Jurusan	: Akuntansi
Program Studi	: SI Akuntansi
Konsentrasi	: Akuntansi Sektor Publik
Judul Skripsi	: Pengaruh Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, dan Penerapan Sistem Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan Kompetensi Sumber Daya Manusia sebagai Variabel Moderasi

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi dengan judul tersebut di atas, secara keseluruhan adalah murni karya penulis sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali bagian-bagian yang dirujuk sebagai sumber pustaka sesuai dengan Pedoman Penulisan Karya Akhir Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura Tahun 2019 (lembar hasil pemeriksaan plagiat terlampir).

Apabila di dalamnya terdapat kesalahan dan kekeliruan, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis yang dapat berakibat pada pembatalan gelar kesarjanaan di Universitas Tanjungpura.

Demikian pernyataan ini penulis buat dengan sebenar-benarnya.

Pontianak, 08 Mei 2023



Olivia Adinda Putri
NIM. B1031191044

PERTANGGUNG JAWABAN SKRIPSI

Saya, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Olivia Adinda Putri
NIM : B1031191044
Jurusan : Akuntansi
Program Studi : S1 Akuntansi
Konsentrasi : Akuntansi Sektor Publik
Tanggal Ujian : 24 Mei 2023

Judul Skripsi:

Pengaruh Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, dan Penerapan Sistem Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan Kompetensi Sumber Daya Manusia sebagai Variabel Moderasi

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber data dan informasi baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Pontianak, 08 Mei 2023



Olivia Adinda Putri
NIM. B1031191044

LEMBAR YURIDIS

Pengaruh Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, dan Penerapan Sistem Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan Kompetensi Sumber Daya Manusia sebagai Variabel Moderasi

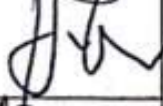
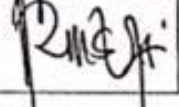
Penanggung Jawab Yuridis



Olivia Adinda Putri
B1031191044

Jurusan : Akuntansi
Program Studi : S1 Akuntansi
Konsentrasi : Akuntansi Sektor Publik
Tanggal Ujian dan Komprehensif : 24 Mei 2023

MAJELIS PENGUJI

No.	Majelis Penguji	Nama/NIP	Tgl/Bln/Thn	Tanda Tangan
1	Ketua Penguji	Dr. Muhsin, S.E., M.Si., Ak., ACPA.	30/05/2023	
		NIP. 197210012006041001		
2	Sekretaris Penguji	Nina Febriana Dosinta, S.E., M.Si.	30/05/2023	
		NIP. 198002272006042001		
3	Penguji 1	Dr. Haryono, S.E., M.Si., Ak., CA., CPA., ASEAN CPA., CFA.	06/06/2023	
		NIP. 196306301990021001		
4	Penguji 2	Rusliyawati, S.E., M.Si., Ak.	30/05/2023	
		NIP. 197901272002122002		

Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat dan Lulus
Dalam Ujian Skripsi dan Komprehensif
Pontianak, 09 JUN 2023
Ketua Program Studi Akuntansi



Kristina Yunita, S.E., M.Si., Ak., CA.
NIP. 197906182002122003

UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas berkat dan rahmat-NYA yang telah dilimpahkan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul “Pengaruh Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, dan Penerapan Sistem Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan Kompetensi Sumber Daya Manusia sebagai Variabel Moderasi” tepat pada waktunya. Penulisan skripsi ini dimaksudkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Strata 1 dengan gelar Sarjana Akuntansi pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura Pontianak. Dalam penulisan ini, penulis telah mendapatkan bimbingan, dorongan, bantuan, serta doa dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Dr. Barkah, S.E., M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura.
2. Ibu Dr. Nella Yantiana, S.E., M.M., Ak., CA, CMA, CPA. selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura.
3. Ibu Khristina Yunita, S.E., M.Si., Ak., C.A. selaku Ketua Program Studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura.
4. Bapak Dr. Muhsin, S.E., M.Si., Ak., ACPA. selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan arahan, saran, dan dorongan kepada penulis.
5. Ibu Nina Febriana Dosinta, S.E., M.Si. selaku Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan arahan, saran, dan dorongan kepada penulis.

6. Bapak dan Ibu Dosen, serta Staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura yang telah memberikan bekal ilmu yang sangat bermanfaat bagi penulis.
7. Kedua Orang Tua tercinta, Bapak Purwadi dan Ibu Sumiati dan Abang tersayang Yuanda Hadi Guna Putra, S.Kom. yang tidak pernah lelah selalu memberikan dorongan, semangat, doa serta kasih sayangnya yang luar biasa kepada penulis.
8. Buat teman seperjuangan sekaligus sahabat penulis Putri Laraswati dan Rizki Ariyanti, yang selalu setia menemani, membantu, dan mendukung penulis selama berkuliah dan penyelesaian skripsi ini.
9. Saudari Aldina Mega yang selalu membantu dan memberikan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Semua teman-teman Akuntansi Kelas A Angkatan 2019 yang telah berjuang bersama, terima kasih atas bantuan, dukungan, serta doa yang telah diberikan kepada penulis.
11. Tujuh member BTS: *Kim Namjoon, Kim Seokjin, Min Yoongi, Jung Hoseok, Park Jimin, Kim Taehyung, Jung Jungkook* yang selalu memberikan semangat kepada penulis melalui lagu-lagunya.
12. Berbagai pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Semoga semua bantuan dan jasa baik yang diberikan kepada penulis akan mendapatkan balasan dari Allah SWT. Akhir kata penulis ucapkan terimakasih, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat yang berarti bagi kita semua.

Pontianak, 09 Mei 2023

Penulis,



Olivia Adinda Putri

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemahaman standar akuntansi pemerintah, penerapan sistem akuntansi keuangan daerah, dan penerapan sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dengan kompetensi sumber daya manusia sebagai variabel moderasi. Penelitian ini termasuk penelitian kuantitatif yang menggunakan data primer. Populasi dari penelitian ini adalah OPD Kota Pontianak dan sampel yang digunakan adalah pegawai berjabatan kepala sub bagian keuangan dan bendahara di setiap OPD. Teknik dalam pengambilan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling*. Data dalam penelitian ini dianalisis menggunakan metode *Structural Equation Modelling* (SEM) dengan pendekatan *Partial Least Squares* (PLS) dengan bantuan perangkat lunak Warppls 7.0. Hasil penelitian ini menunjukkan pemahaman standar akuntansi pemerintah dan penerapan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Sedangkan, penerapan sistem pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Kompetensi sumber daya manusia tidak mampu memoderasi pengaruh pemahaman standar akuntansi pemerintah dan penerapan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Namun, kompetensi sumber daya manusia mampu memoderasi pengaruh penerapan sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Kata Kunci: Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Penerapan Sistem Pengendalian Internal, Kompetensi Sumber Daya Manusia, dan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

RINGKASAN SKRIPSI

Pengaruh Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, dan Penerapan Sistem Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan Kompetensi Sumber Daya Manusia sebagai Variabel Moderasi

Latar Belakang

Dalam penyelenggaraan otonomi daerah, pemerintah daerah berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan daerahnya secara tertib yaitu dengan menyajikan laporan keuangan yang berkualitas. Laporan keuangan yang disajikan harus memenuhi beberapa karakteristik kualitatif yang tercantum dalam PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, yaitu terdiri dari relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. Setiap tahunnya laporan keuangan pemerintah daerah akan diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan akan dinyatakan dalam empat opini yang terdiri atas Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Tidak Wajar (TW), dan Tidak Menyatakan Pendapat (TMP). Laporan keuangan pemerintah daerah dapat dinyatakan berkualitas baik jika memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK.

Fenomena berkaitan dengan kualitas laporan keuangan menarik untuk dikaji lebih lanjut. Hal ini dikarenakan masih terdapat laporan keuangan pemerintah daerah yang disajikan tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal ini dibuktikan dengan hasil pemeriksaan BPK dalam IHPS I Tahun 2021, diungkapkan bahwa terdapat 55 dari total LKPD yang diperiksa memperoleh opini selain WTP, diantaranya 49 LKPD mendapatkan WDP, 4 LKPD mendapatkan TMP, dan 2 LKPD mendapatkan TW pada tahun 2020. Selain itu, ditemukan juga adanya 11.662 permasalahan yang terdiri dari 5.367 (46%) berhubungan dengan kelemahan sistem pengendalian internal dan 6.295 (54%) lainnya berhubungan dengan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Pemahaman standar akuntansi pemerintah yang dimiliki para penyusun laporan keuangan berperan dalam keberhasilan terciptanya laporan keuangan yang berkualitas. Seperti yang tercantum dalam PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah bahwa penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah daerah wajib berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) sehingga pemahaman terhadap SAP menjadi sesuatu keharusan bagi para penyusun laporan keuangan guna meningkatkan kualitas laporan keuangan. Selain itu, penerapan sistem akuntansi keuangan daerah juga berperan penting dalam peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah karena dapat menciptakan pengelolaan keuangan daerah yang tepat dan konsisten. Sedangkan sistem pengendalian internal diterapkan untuk memberikan keyakinan atas keandalan laporan keuangan yang telah disajikan. Pemahaman standar akuntansi pemerintah, penerapan sistem akuntansi keuangan, dan penerapan sistem pengendalian internal dapat dilakukan dengan maksimal apabila dilakukan oleh sumber

daya manusia yang berkompeten pada bidang akuntansi. Kompetensi dapat membantu manusia dalam memahami ilmu akuntansi sehingga standar akuntansi pemerintah dapat dipahami dan sistem akuntansi keuangan serta sistem pengendalian internal dapat diterapkan dengan optimal. Dengan adanya keterlibatan sumber daya manusia yang berkompeten, maka dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan.

Permasalahan

1. Apakah pemahaman standar akuntansi pemerintah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah?
2. Apakah penerapan sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah?
3. Apakah penerapan sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah?
4. Apakah kompetensi sumber daya manusia dapat memoderasi pengaruh pemahaman standar akuntansi pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah?
5. Apakah kompetensi sumber daya manusia dapat memoderasi pengaruh penerapan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah?
6. Apakah kompetensi sumber daya manusia dapat memoderasi pengaruh penerapan sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah?

Tujuan Penelitian

1. Untuk menguji dan menganalisis adanya pengaruh pemahaman standar akuntansi pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
2. Untuk menguji dan menganalisis adanya pengaruh penerapan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
3. Untuk menguji dan menganalisis adanya pengaruh penerapan sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
4. Untuk menguji dan menganalisis adanya pengaruh kompetensi sumber daya manusia dalam memoderasi pemahaman standar akuntansi pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
5. Untuk menguji dan menganalisis adanya pengaruh kompetensi sumber daya manusia dalam memoderasi penerapan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
6. Untuk menguji dan menganalisis adanya pengaruh kompetensi sumber daya manusia dalam memoderasi penerapan standar pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Metode Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian kuantitatif yang menggunakan metode survei. Data yang digunakan yaitu data primer dengan kuesioner sebagai instrumen penelitian. Penelitian ini dilakukan di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Pontianak. Sampel dalam penelitian ini adalah pegawai yang berjabatan kepala sub bagian keuangan dan bendahara di masing-masing OPD Kota Pontianak. Penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* dalam pengambilan sampel. Metode analisis data yang digunakan yaitu metode *Structural Equation Modelling* (SEM) dengan pendekatan *Partial Least Squares* (PLS). Adapun perangkat lunak yang digunakan dalam menganalisis data yaitu WarpPLS 7.0.

Hasil dan Pembahasan

1. Pengaruh Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Hasil pengujian data menunjukkan bahwa variabel pemahaman standar akuntansi pemerintah memperoleh nilai *path coefficient* sebesar 0.269 dengan nilai *p-value* sebesar 0.015 dimana lebih kecil dari 0.05. Hal ini menunjukkan bahwa Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, maka hipotesis pertama diterima.
2. Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Hasil pengujian data menunjukkan bahwa variabel penerapan sistem akuntansi keuangan daerah memperoleh nilai *path coefficient* sebesar 0.294 dengan nilai *p-value* sebesar 0.008 dimana lebih kecil dari 0.05. Hal ini menunjukkan bahwa Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, maka hipotesis kedua diterima.
3. Pengaruh Penerapan Sistem Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Hasil pengujian data menunjukkan bahwa variabel penerapan sistem pengendalian internal memperoleh nilai *path coefficient* sebesar 0.111 dengan nilai *p-value* sebesar 0.193 dimana lebih besar dari 0.05. Hal ini menunjukkan bahwa Penerapan Sistem Pengendalian Internal tidak berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, maka hipotesis ketiga ditolak.
4. Kompetensi Sumber Daya Manusia Memoderasi Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Hasil pengujian data menunjukkan bahwa variabel kompetensi sumber daya manusia memoderasi pemahaman standar akuntansi pemerintah memperoleh nilai *path coefficient* sebesar 0.005 dengan nilai *p-value* sebesar 0.484 dimana lebih besar dari 0.05. Hal ini menunjukkan bahwa Kompetensi Sumber Daya Manusia tidak memoderasi pengaruh Pemahaman Standar Akuntansi

Pemerintah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, maka hipotesis keempat ditolak.

5. Kompetensi Sumber Daya Manusia Memoderasi Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Hasil pengujian data menunjukkan bahwa variabel kompetensi sumber daya manusia moderasi penerapan sistem akuntansi keuangan daerah memperoleh nilai *path coefficient* sebesar 0.084 dengan nilai *p-value* sebesar 0.259 dimana lebih besar dari 0.05. Hal ini menunjukkan bahwa Kompetensi Sumber Daya Manusia tidak memoderasi pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, maka hipotesis kelima ditolak.
6. Kompetensi Sumber Daya Manusia Memoderasi Penerapan Sistem Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Hasil pengujian data menunjukkan bahwa variabel kompetensi sumber daya manusia moderasi penerapan sistem pengendalian internal memperoleh nilai *path coefficient* sebesar 0.286 dengan nilai *p-value* sebesar 0.010 dimana lebih kecil dari 0.05. Hal ini menunjukkan bahwa Kompetensi Sumber Daya Manusia memoderasi pengaruh Penerapan Sistem Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, maka hipotesis keenam diterima.

Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan pada penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
2. Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
3. Penerapan Sistem Pengendalian Internal tidak berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
4. Kompetensi Sumber Daya Manusia tidak memoderasi pengaruh Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
5. Kompetensi Sumber Daya Manusia tidak memoderasi pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
6. Kompetensi Sumber Daya Manusia memoderasi pengaruh Penerapan Sistem Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Saran dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Daerah Kota Pontianak
 - a. Pemerintah Kota Pontianak diharapkan untuk dapat meningkatkan kompetensi sumber daya manusia yang dimiliki guna meningkatkan kualitas laporan keuangan. Hal ini dapat dilakukan dengan mengadakan kegiatan pendidikan dan pelatihan yang berhubungan dengan penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah.
 - b. Dalam peningkatan kualitas laporan keuangan, Pemerintah Kota Pontianak diharapkan untuk dapat meningkatkan penerapan sistem pengendalian internal oleh pimpinan dan seluruh pegawai secara terus-menerus guna mencegah terjadinya *fraud*.
2. Bagi Peneliti Selanjutnya
 - a. Jumlah populasi dan sampel untuk penelitian selanjutnya dapat lebih diperluas dengan meneliti di beberapa kabupaten/kota agar data yang diperoleh dapat lebih maksimal.
 - b. Variabel dalam penelitian ini memiliki kontribusi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah sebesar 68,5% dan 31,5% lainnya dipengaruhi oleh variabel di luar model penelitian ini. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya perlu menambahkan variabel lain seperti pemanfaatan teknologi informasi, peran audit internal, serta variabel lainnya yang kemungkinan memiliki pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
 - c. Penelitian selanjutnya dapat menggunakan *google form* sebagai alternatif dalam penyebaran kuesioner sehingga dapat menghemat waktu dan biaya.
 - d. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat melengkapi metode penelitian dengan metode wawancara untuk memastikan responden dapat memahami pernyataan kuesioner dengan baik sehingga hasil yang diperoleh dapat lebih akurat.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN BEBAS DARI PLAGIAT	i
PERTANGGUNGJAWABAN SKRIPSI	ii
LEMBAR YURIDIS.....	iii
UCAPAN TERIMA KASIH	iv
ABSTRAK	vi
RINGKASAN SKRIPSI	vii
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.2.1 Pernyataan Masalah	8
1.2.2 Pertanyaan Penelitian	8
1.3 Tujuan Penelitian	9
1.4 Kontribusi Penelitian	10
1.4.1 Kontribusi Teoritis	10
1.4.2 Kontribusi Praktis	10
1.5 Gambaran Kontekstual Penelitian	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
2.1 Landasan Teori	12
2.1.1 Teori <i>Stewardship</i>	12
2.1.2 Kualitas Laporan Keuangan	13
2.1.3 Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah	15
2.1.4 Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah	16
2.1.5 Penerapan Sistem Pengendalian Internal	17
2.1.6 Kompetensi Sumber Daya Manusia	18
2.2 Kajian Empiris	20
2.3 Kerangka Konseptual dan Hipotesis Penelitian	31
2.3.1 Kerangka Konseptual	32
2.3.2 Hipotesis Penelitian	32
BAB III METODE PENELITIAN	39

3.1 Bentuk Penelitian	39
3.2 Tempat dan Waktu Penelitian	39
3.3 Data Penelitian	40
3.4 Populasi dan Sampel	40
3.4.1 Populasi	40
3.4.2 Sampel	41
3.5 Variabel Penelitian	41
3.5.1 Variabel Dependen	41
3.5.2 Variabel Independen	42
3.5.3 Variabel Moderasi	44
3.6 Metode Analisis	44
3.6.1 Analisis Statistik Deskriptif	45
3.6.2 Model Pengukuran (<i>Outer Model</i>)	45
3.6.3 Model Struktural (<i>Inner Model</i>)	47
3.6.4 Uji Hipotesis	48
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	49
4.1 Hasil Penelitian	49
4.1.1 Gambaran Umum Penelitian	49
4.1.2 Analisis Statistik Deskriptif	50
4.1.3 Pengujian Model Pengukuran (<i>Outer Model</i>)	57
4.1.4 Pengujian Model Struktural (<i>Inner Model</i>)	61
4.1.5 Uji Hipotesis	65
4.2 Pembahasan	68
4.2.1 Pengaruh Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	69
4.2.2 Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	71
4.2.3 Pengaruh Penerapan Sistem Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	72
4.2.4 Kompetensi Sumber Daya Manusia Memoderasi Pengaruh Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	73
4.2.5 Kompetensi Sumber Daya Manusia Memoderasi Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	75
4.2.6 Kompetensi Sumber Daya Manusia Memoderasi Pengaruh Penerapan Sistem Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	76
BAB V PENUTUP	78

5.1 Kesimpulan	78
5.2 Keterbatasan	80
5.3 Rekomendasi	80
DAFTAR PUSTAKA	82
LAMPIRAN	86

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Permasalahan Kelemahan SPI atas LKPD Tahun 2020	4
Tabel 1.2 Permasalahan Ketidakpatuhan atas LKPD Tahun 2020	4
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	20
Tabel 4.1 Penyebaran dan Pengembalian Kuesioner	49
Tabel 4.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	50
Tabel 4.3 Karakteristik Responden Berdasarkan Usia	51
Tabel 4.4 Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir	52
Tabel 4.5 Karakteristik Responden Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan	53
Tabel 4.6 Karakteristik Responden Berdasarkan Masa Kerja	54
Tabel 4.7 Statistik Deskriptif Variabel	55
Tabel 4.8 <i>Combine Loadings</i> dan <i>Cross Loadings</i>	57
Tabel 4.9 Akar AVE dan Koefisien Korelasi	60
Tabel 4.10 <i>Composite Reliability</i> dan <i>Cronbach's Alpha</i>	61
Tabel 4.11 <i>Model Fit and Quality Indices</i>	62
Tabel 4.12 <i>R-Squared</i> dan <i>Q-Squared</i>	64
Tabel 4.13 <i>Path Coefficients</i> dan <i>P-values</i>	66
Tabel 4.14 Kesimpulan Hasil Penelitian	68

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran	32
Gambar 4.1 Model Penelitian	66

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dengan adanya perubahan sistem penyelenggaraan pemerintah dari sentralisasi menjadi desentralisasi menyebabkan otonomi daerah harus dilaksanakan (Kapriana & Agung, 2020). Pemberlakuan otonomi daerah menjadikan pemerintah daerah berkewajiban untuk mengatur dan menyelenggarakan urusan pemerintahan daerahnya sendiri sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku. Hal ini menjadikan pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk mengelola keuangannya secara mandiri. Dalam mewujudkan pengelolaan keuangan yang baik, pemerintah daerah diwajibkan untuk menyajikan laporan keuangan yang transparan, tertib, dan akuntabel kepada publik sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah atas penggunaan anggaran selama satu periode.

Laporan keuangan pemerintah daerah merupakan suatu laporan yang menggambarkan pengelolaan keuangan pemerintah daerah selama suatu periode. Laporan keuangan merupakan wujud pertanggungjawaban yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Laporan keuangan tersebut akan diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan kemudian diserahkan kepada DPRD untuk disetujui (Mulia, 2018). Maka dari itu, laporan keuangan yang disusun pemerintah daerah haruslah memiliki kualitas yang baik.

Laporan keuangan merupakan laporan terstruktur yang disusun guna memberikan informasi yang relevan bagi para pengguna laporan keuangan (Sihasale *et.al*). Laporan keuangan memuat informasi berkenaan posisi keuangan dan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan operasional pemerintahan daerah selama satu periode. Penyajian laporan keuangan yang berkualitas ditujukan agar informasi yang terkandung dalam laporan keuangan

dapat bermanfaat bagi pemerintah daerah itu sendiri dan pengguna laporan keuangan lainnya dalam pengambilan keputusan. Oleh karena itu, sudah sepatutnya bagi pemerintah daerah untuk menyajikan laporan keuangan yang tepat dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Dalam upaya mewujudkan laporan keuangan yang berkualitas, penyusunan laporan keuangan harus sesuai dengan perundang-undangan yang telah ditetapkan atas LKPD. Tercantum pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah bahwa laporan keuangan yang disajikan oleh pemerintah daerah dapat berkualitas apabila memenuhi empat karakteristik kualitatif laporan keuangan, yakni diantaranya relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. Yang mana laporan keuangan yang disajikan tersebut akan diserahkan ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk diperiksa kemudian. Hasil pemeriksaan laporan keuangan akan berupa opini audit yang dinyatakan oleh BPK. Adapun opini yang dapat dinyatakan oleh BPK yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Tidak Wajar (TW), dan Tidak Memberikan Pendapat (TMP).

Pada setiap tahunnya BPK akan memeriksa laporan keuangan pemerintah daerah dan memberikan *output* berupa opini audit. Laporan keuangan yang memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK dapat dikatakan laporan tersebut berkualitas. Selain dari opini hasil pemeriksaan BPK, kualitas laporan keuangan juga dapat dilihat dari segi kesesuaian mengikuti SAP dan peraturan perundang-undangan dalam penyusunannya. Dalam menjaga kualitas laporan keuangan tetap baik, maka pemerintah daerah perlu menerapkan sistem akuntansi keuangan dan sistem pengendalian internal yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkompeten.

Fenomena yang berkaitan dengan kualitas laporan keuangan pada lingkungan pemerintah daerah adalah topik yang menarik untuk dikaji lebih lanjut. Pada saat ini, laporan keuangan pemerintah daerah sudah dapat dikatakan memiliki kualitas yang cukup baik. Seperti data yang ditunjukkan dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2021, mengungkapkan bahwa BPK telah memeriksa 541 dari 542 laporan keuangan yang wajib disusun oleh pemerintah daerah. Hasil pemeriksaan tersebut menunjukkan bahwa opini WTP atas laporan keuangan pemerintah daerah mengalami peningkatan sebesar 20% selama 5 tahun terakhir, yang awalnya 378 (70%) pada tahun 2016 meningkat menjadi 486 (90%) pada tahun 2020. Pada tahun 2019 data menunjukkan bahwa jumlah LKPD yang memperoleh opini WTP dari BPK sebanyak 485. Jika dibandingkan capaian antara tahun 2019 dengan tahun 2020 jumlah pemerolehan opini WTP atas LKPD mengalami peningkatan. Hal ini dapat dicapai karena adanya perbaikan atas permasalahan yang terjadi pada tahun sebelumnya yang dilakukan pemerintah daerah sesuai dengan rekomendasi yang telah diberikan BPK.

Meskipun opini WTP atas LKPD mengalami peningkatan pada tahun 2020 dibanding tahun sebelumnya, ternyata masih terdapat LKPD yang memperoleh opini selain WTP dari BPK. Hal ini terjadi pada laporan keuangan yang disajikan oleh beberapa pemerintah daerah. Berdasarkan IHPS I Tahun 2021, diungkapkan bahwa dari total LKPD yang diperiksa terdapat 55 LKPD yang mendapatkan opini selain WTP, diantaranya 49 LKPD mendapatkan WDP, 4 LKPD mendapatkan TMP, dan 2 LKPD mendapatkan TW pada tahun 2020. Hal ini dapat terjadi dikarenakan adanya ketidaksesuaian terhadap SAP atas akun-akun yang disajikan dalam laporan keuangan atau tidak adanya bukti yang memadai.

Selain itu, dalam IHPS I Tahun 2021 mengungkapkan bahwa BPK juga menemukan permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan sistem

pengendalian internal dan kepatuhan terhadap perundang-undangan yang terjadi di lingkungan pemerintah daerah. Hasil pemeriksaannya mengungkapkan bahwa terdapat 11.662 permasalahan yang terdiri dari 5.367 (46%) berhubungan dengan kelemahan sistem pengendalian internal dan 6.295 (54%) lainnya berhubungan dengan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Data tersebut mengindikasikan bahwa pada beberapa pemerintah daerah ternyata masih belum sepenuhnya menerapkan SPI secara optimal dan masih cukup banyak yang belum mematuhi ketentuan perundang-undangan yang telah ditetapkan atas LKPD.

Jumlah dan jenis permasalahan yang ditemukan BPK terkait kelemahan SPI atas LKPD pada tahun 2020 dapat dilihat pada tabel 1.1 sebagai berikut.

Tabel 1.1

Permasalahan Kelemahan SPI atas LKPD Tahun 2020

No	Permasalahan	Jumlah
1.	Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan	1.699
2.	Kelemahan Sistem Pengendalian berkenaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja	2.498
3.	Kelemahan Struktur Pengendalian Intern	1.170
Total		5.367

(Sumber: www.bpk.go.id – IHPS I Tahun 2021)

Jumlah dan nilai permasalahan yang ditemukan BPK terkait ketidakpatuhan ketentuan perundang-undangan atas LKPD pada tahun 2020 dapat dilihat pada tabel 1.2 sebagai berikut.

Tabel 1.2**Permasalahan Ketidakpatuhan atas LKPD Tahun 2020**

Sub Kelompok Temuan	Permasalahan	
	Jumlah	Nilai (Rp miliar)
Kerugian	2.645	1.194,38
Potensi Kerugian	549	260,36
Kekurangan Penerimaan	854	623,87
Penyimpangan Administrasi	2.247	-
Total	6.295	2.078,61

(Sumber: www.bpk.go.id – IHPS I Tahun 2021)

Kota Pontianak merupakan salah satu dari banyak entitas pemerintah daerah di Indonesia yang memperoleh opini WTP dari hasil pemeriksaan BPK selama 5 tahun berturut-turut dari tahun 2016 hingga tahun 2020. Hal ini merupakan suatu pencapaian yang baik, mengingat masih terdapat beberapa pemerintah daerah yang berada di Provinsi Kalimantan Barat yang belum dapat mencapai prestasi tersebut. Jika dinilai dari segi pemerolehan opini, maka laporan keuangan pemerintah Kota Pontianak dapat dinilai memiliki kualitas yang baik. Meskipun demikian, hal tersebut harus dikaji lebih lanjut karena banyak faktor yang dapat mempengaruhi tingkat kualitas laporan keuangan.

SAP merupakan suatu pedoman akuntansi yang berfungsi sebagai dasar dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Apabila penyusunan laporan keuangan telah sesuai dengan SAP, maka peluang kesalahan saji yang material tidak akan terjadi. Oleh karena itu, pemahaman terhadap SAP yang baik dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan yang dihasilkan. Hal ini didukung dengan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Sihasale *et.al* (2018) menyatakan bahwa pemahaman SAP berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Selain dari pemahaman atas SAP, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) juga berperan penting dalam penyusunan laporan keuangan. SAKD merupakan rangkaian prosedur akuntansi yang disusun berdasarkan standar akuntansi yang berlaku. SAKD diterapkan agar dapat mengatur setiap proses pengelolaan keuangan yang membutuhkan perlakuan akuntansinya. Dalam hasil penelitian yang dilakukan oleh Darmawan dan Darwanis (2018) menyatakan bahwa SAKD memiliki pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Dengan demikian, apabila SAKD telah diterapkan dengan baik, maka dapat membantu pemerintah dalam menghasilkan laporan keuangan yang lengkap dan sesuai dengan standar yang berlaku.

Faktor lain yang berperan penting dalam kualitas laporan keuangan adalah Sistem Pengendalian Internal (SPI). SPI merupakan proses pengendalian dan pengawasan yang dilakukan secara berulang guna mencegah terjadinya penyimpangan internal pada suatu organisasi. SPI dirancang khusus untuk memberikan keyakinan bahwa setiap lapisan di instansi pemerintah telah melakukan kewajibannya dan patuh terhadap peraturan dalam rangka pencapaian tujuan organisasi. Dalam proses pengelolaan keuangan, SPI diterapkan untuk mengontrol dan memastikan bahwa tidak ada penyelewengan pada setiap proses yang berkenaan penyusunan laporan keuangan sehingga dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan yang dihasilkan. Menurut Indrayani & Widiastuti (2020) dalam hasil penelitiannya menyatakan bahwa sistem pengendalian internal memiliki pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Dari beberapa faktor yang telah dipaparkan di atas, hal tersebut tidak akan dapat diterapkan dengan maksimal apabila tanpa keterlibatan sumber daya manusia yang berkualitas. Kompetensi yang dimiliki sumber daya manusia akan dapat membantu manusia itu sendiri dalam melaksanakan kewajibannya dengan baik. Dalam memperoleh laporan keuangan yang berkualitas, maka dibutuhkan sumber daya manusia yang memiliki latar belakang pada bidang akuntansi. Hal ini dikarenakan dalam proses penyusunan dan penyajian laporan keuangan tidak terlepas dari

pemahaman sumber daya manusia atas standar dan kebijakan akuntansi yang digunakan serta pengendalian internal yang diterapkan. Oleh karena itu, kompetensi sumber daya manusia diduga dapat memoderasi pemahaman standar akuntansi pemerintah, sistem akuntansi keuangan daerah, dan sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Hal yang berkaitan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah telah diteliti oleh beberapa penelitian terdahulu. Pada penelitian-penelitian tersebut menunjukkan hasil yang berbeda dari penelitian satu dengan penelitian yang lainnya. Hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Indrayani dan Widiastuti (2020) menunjukkan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, tetapi sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hasil penelitian Purwati *et.al* (2022) menunjukkan bahwa standar akuntansi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, tetapi sistem pengendalian internal dan kompetensi sumber daya manusia tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hasil penelitian Darmawan dan Darwanis (2018) menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal, pemanfaatan teknologi, kompetensi sumber daya manusia, dan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Sholohah *et.al* (2019) menunjukkan bahwa *good government governance*, sistem akuntansi pemerintah, kualitas aparatur pemerintah daerah, kompetensi sumber daya manusia, pemahaman sistem akuntansi keuangan tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, tetapi penerapan pengawasan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hasil penelitian Sihasale *et.al* (2018) menunjukkan pemahaman standar akuntansi pemerintahan dan pemanfaatan sistem informasi akuntansi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Oleh karena itu, karena adanya hasil penelitian yang beragam pada penelitian sebelumnya membuat peneliti ingin menguji kembali berkenaan topik penelitian ini.

Penelitian ini merujuk pada penelitian yang dilakukan Indrayani dan Widiastuti (2020) dengan menguji kembali variabel standar akuntansi keuangan daerah dan sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dengan kompetensi sumber daya manusia sebagai pemoderasi. Yang membedakan dari penelitian ini yaitu adanya penambahan pemahaman standar akuntansi pemerintah pada variabel independen yang merujuk pada penelitian Sihasale *et.al* (2018). Alasan penambahan variabel tersebut karena dengan adanya pemahaman atas standar akuntansi yang baik dari sumber daya manusia yang terlibat, maka laporan keuangan yang disusun akan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah sehingga dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan yang dihasilkan. Selain itu, perbedaan lain dari penelitian ini adalah lokasi penelitian yang dilakukan. Penelitian ini dilakukan di OPD Kota Pontianak dengan alasan Kota Pontianak merupakan pemerintah daerah yang memiliki predikat kualitas laporan keuangan yang baik dan mampu mempertahankan predikat tersebut selama 5 tahun berturut-turut yaitu dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020. Dengan demikian, judul dari penelitian ini yaitu **“Pengaruh Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Penerapan Sistem Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan Kompetensi Sumber Daya Manusia sebagai Variabel Moderasi”**.

1.2 Rumusan Masalah

1.2.1 Pernyataan Masalah

Permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini adalah mengenai kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Adapun faktor-faktor yang dapat memengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah diantaranya standar akuntansi pemerintah, sistem akuntansi keuangan daerah, dan sistem pengendalian internal yang mana dapat diterapkan dengan baik apabila dilakukan oleh sumber daya manusia yang berkompeten.

1.2.2 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan pernyataan masalah yang telah diuraikan di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut

1. Apakah pemahaman standar akuntansi pemerintah memiliki pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah?
2. Apakah penerapan sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah?
3. Apakah penerapan sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah?
4. Apakah kompetensi sumber daya manusia mampu dalam memoderasi pengaruh pemahaman standar akuntansi pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah?
5. Apakah kompetensi sumber daya manusia mampu dalam memoderasi pengaruh penerapan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah?
6. Apakah kompetensi sumber daya manusia mampu dalam memoderasi pengaruh penerapan sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah dipaparkan di atas, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh dari pemahaman standar akuntansi pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh dari penerapan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
3. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh dari penerapan sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

4. Untuk menguji dan menganalisis kompetensi sumber daya manusia dalam memoderasi pengaruh pemahaman standar akuntansi pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
5. Untuk menguji dan menganalisis kompetensi sumber daya manusia dalam memoderasi pengaruh penerapan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
6. Untuk menguji dan menganalisis kompetensi sumber daya manusia dalam memoderasi pengaruh penerapan standar pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

1.4 Kontribusi Penelitian

1.4.1 Kontribusi Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan menambah ilmu pengetahuan berkenaan pengaruh pemahaman standar akuntansi pemerintah, penerapan sistem akuntansi keuangan daerah, dan penerapan sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dengan kompetensi sumber daya manusia sebagai pemoderasi.

1.4.2 Kontribusi Praktis

1. Bagi Peneliti

Dengan adanya penelitian ini, peneliti berharap dapat menambah wawasan bagi peneliti mengenai pengaruh pemahaman standar akuntansi pemerintah, penerapan sistem akuntansi keuangan daerah, dan penerapan sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dengan kompetensi sumber daya manusia sebagai pemoderasi.

2. Bagi Akademisi

Dengan adanya penelitian ini, peneliti berharap dapat dijadikan referensi untuk mengembangkan ilmu pengetahuan pada penelitian yang sejenis.

3. Bagi Pemerintah Daerah

Dengan adanya penelitian ini, peneliti berharap dapat dijadikan saran bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan.

1.5 Gambaran Kontekstual Penelitian

Kualitas laporan keuangan dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor yang diantaranya pemahaman sistem akuntansi pemerintah dan sistem akuntansi keuangan daerah yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan, serta penerapan sistem pengendalian internal yang baik. Hal tersebut dapat dilaksanakan dengan maksimal apabila pemerintah daerah memiliki sumber daya manusia yang berkompeten pada bidang akuntansi. Penelitian ini dilakukan di Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) yang berada di Kota Pontianak.